

**Judul** : Pantaskah keluarga jatuh miskin akibat judi online diberi bansos  
**Tanggal** : Rabu, 19 Juni 2024  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Pantaskah Keluarga Jatuh Miskin Akibat Judi Online Diberi Bansos

USULAN agar korban judi online (judi) dapat bantuan sosial (bansos) yang dicetuskan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menuai banyak kritik. Setelah usulannya itu banyak diprotes, Muhadjir coba meluruskan. Kata dia, bansos bukan untuk pelaku judi online, tapi keluarganya. Awalnya, saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Kamis (13/6/2024), Muhadjir menyoroti dampak dari judi yang semakin mengkhawatirkan. Salah satunya, banyak masyarakat yang menjadi miskin akibat kecanduan judi. Muhadjir kemudian mengusulkan untuk memasukkan korban judi sebagai penerima bansos. Namun, usulan agar korban judi menerima

bansos, mendapat banyak protes. Majelis Ulama Indonesia (MUI), politisi, akademisi, hingga rakyat biasa, menolok korban judi dapat bansos dari Pemerintah. Setelah usulannya itu banyak diprotes, Muhadjir coba meluruskan. Kata dia, publik salah paham. Menurutnya, bukan pelaku judi yang dapat bansos, tapi keluarganya yang terkena dampak secara finansial maupun psikologis. Seperti, orangtua, istri, suami, atau anak-anak pelaku. "Kalau sampai jatuh miskin, maka itu yang mendapatkan bantuan sosial," kata Muhadjir usai salat Idul Adha di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2024). Mantan Menteri Pendidikan dan Ke-

budayaan ini menambahkan, keluarga pelaku itu pun tidak serta-merta langsung mendapatkan bansos. Mereka harus melewati proses verifikasi sesuai kriteria penerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, para korban harus bisa memastikan bahwa mereka jatuh miskin akibat anggota keluarganya kecanduan judi online. Dengan demikian, baru bisa masuk kategori penerima bansos. "Jangan bayangkan pemain judi kemudian miskin, langsung dibagi-bagi bansos, bukan begitu," jelasnya. Alasan mengusulkan korban judi jadi penerima bansos, menurutnya, sesuai dengan amanat UUD, Pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa semua fakir miskin, dan anak-anak ter-

lantar dipelihara oleh negara. "Orang miskin itu tidak hanya korban judi online. Semua orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara untuk diberi santunan," ujarnya. Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhammadiyah Pusat ini juga menerangkan, pelaku judi online mulai dari pemain hingga bandar, tidak mungkin menjadi penerima bansos. "Para pelaku itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak. Itulah tugas Satgas penumpasan judi," tegasnya. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Obon Tabroni menyatakan, pemberian bansos tidak melibat penyebab seseorang menjadi miskin. "Saat didata, penerima bansos tidak

akan ditanya miskinnya karena apa. Apa karena judi online atau lainnya," ujar Obon kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (18/6/2024). Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menolak usulan Menko PMK tersebut. Menurut dia, pemberian bansos itu, sama saja memberikan simpati kepada judi online. "Cubit saja usulan itu. Lebih bagus memprioritaskan yang sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bukan karena judi online. Tapi, karena kondisi sosial ekonomi," tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini, Selasa (18/6/2024). Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Obon Tabroni dan Hidayat Nur Wahid.

### HIDAYAT NUR WAHID, Anggota Komisi VIII DPR Seperti Bersimpati Kepada Judi Online



“Narasi ini, seperti ada unsur simpati terhadap judi online yang berdampak kepada keluarga pelakunya. Kalau judinya menguntungkan, maka tidak dipermasalahkan.”

Bagaimana pandangan Anda tentang usul pemberian bansos kepada keluarga pelaku judi online? Scharony, yang dikecupkan adalah komitmen penegakan hukum, yakni melarang judi dengan segala bentuknya. Termasuk, mengingatkan tentang ajaran agama di Indonesia, yang melarang judi dengan segala bentuknya. Scharony, narasi yang disampaikan Pak Menko, bukan memberikan bansos kepada keluarga pelaku judi online.

Ada masalah apa dengan narasi ini? Narasi ini, seperti ada unsur simpati terhadap judi online yang berdampak kepada keluarga pelakunya.

Kalau judinya menguntungkan, maka tidak dipermasalahkan. Seolah-olah seperti itu, meskipun saya yakin Pak Menko PMK menolak judi online. Misalnya, semua pihak menjadi bagian yang mengingatkan agar tidak ada anggota keluarganya terlibat judi

online. Sehingga, pemberian bansos judi online bisa dilakukan secara maksimal. Jika narasinya memberikan bansos kepada keluarga korban judi online, maka bisa dimaknai sebagai sikap simpati kepada judi online.

Menko Muhadjir mengatakan, pemberian bansos ini ada aturan-nya, bahwa semua fakir miskin dan anak-anak terlarang, dipelihara negara. Tanggapan Anda?

Negara harus memelihara fakir miskin, itu memang ketentuan konstitusi. Tetapi, bukan berarti itu diberikan simpati atau memberikan uang kepada warga untuk melongkar hukum, seperti melakukan judi online. Judi, sebaiknya tidak ada

wacana pemberian bansos kepada keluarga korban judi online.

Bagaimana jika pelaku judi online sudah beribadah, dan keluarganya juga sudah beribadah? Untuk menerima bansos itu ada

syarat-syaratnya. Di antaranya, terdapat dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Itu membutuhkan verifikasi dari pihak RT, RW, kelurahan dan sebagainya. Apakah seseorang sudah terikat atau tidak, itu membutuhkan pendataan yang jujur di tingkat lapangan. Tapi, yang harus dihindarkan adalah, penerima yang tercatat di DTKS dan belum menerima bansos, masih sangat banyak.

Terkait pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online, apa tanggapan Anda? Pemerintah harus memutus lingkaran setan judi online. Apalagi, belakangan Pak Jokowi bilang Indonesia darurat judi online. Jumlah

uangnya sangat banyak dan dampak ke keluarganya sangat mengerikan, seperti kasus Polwan membakar suaminya. Ini kan darurat judi online. Jadi, seharusnya apa yang disampaikan oleh pejabat, sejalan dengan langkah pemberantasan judi online. ■ NNM

### OBON TABRONI, Anggota Komisi VIII DPR Pemberian Bansos Tidak Lihat Apa Penyebabnya



“Dalam sistem penerimaan bansos, tidak ditanya miskinnya itu akibat apa. Akibat tidak dapat warisan, akibat judi atau lainnya. Tidak pernah ada kriteria seperti itu.”

Usulan Menko PMK Muhadjir Effendy, keluarga korban judi online mendapatkan bansos. Pandangan Anda?

Kalau dibicarakan, misalnya harus didata siapa saja warga calon penerima bansos akibat judi online, saya tidak sepakat. Dalam sistem penerimaan bansos, tidak ditanya miskinnya itu akibat apa. Akibat tidak dapat warisan, akibat judi atau lainnya. Tidak pernah ada kriteria seperti itu.

Ketika ada seseorang masuk kriteria tidak mampu, maka Pemerintah harus membantu dengan program-program yang ada.

Akan dilihat sesuai kondisi terkini saja ya?

Kalau memang kondisinya seperti itu, pemberian bansos bukan karena faktor penyebab miskin, tetapi kondisinya. Jika kondisinya hari ini memang harus dibantu, ya harus dibantu.

Tentang penyebabnya, misal karena keluarga penjudi, itu tidak mendidik. Untuk itu, orientasi kita bukan pada kondisi ri.

Apakah tidak akan menimbulkan kecenderungan sosial, jika keluarga penjudi online mendapatkan bansos?

Kalau kita lihat kondisi ekonominya hancur, untuk makan saja sulit, banduh. Kan konyeknya seperti itu. Kita tidak melihat penyebabnya apa. Oh karena kami atau keluarga kami penjudi, jadi tidak saya kasih. Tidak seperti itu.

Apa yang harus dilakukan Pemerintah dalam pemberantasan judi online?

Kan sudah ada langkah Pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Saya melihat judi online ini ada karena kemudahan.

Maksudnya? Dulu orang mau berjudi sulit prosesnya, sekarang hanya di dalam genggaman, sudah bisa. Judi online ini harus bisa dihilangkan, meskipun kita harus kelir berjalan dengan teknologi. Kita tutup aplikasi ini, mereka buka aplikasi lainnya. Kita blokir, mereka buka lainnya.

Apakah cukup pemberantasan judi online dengan pendekatan hukum? Perlu juga ada sosialisasi, pendidikan tentang dampaknya ke masyarakat. Maka akan berkurang judi online. Apalagi, sekarang ini pelaku judi online sudah menyasar anak-anak dan ibu-ibu. Kalau anak-anak kan tanggung jawab orangtuanya. Tidak

bisa kita kasih semua tanggung jawab ke Pemerintah. Ini memang sudah semestawi. Emak-emak pun sudah ada yang ikut. Sudah parah. ■ NNM